

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2023**



DISAMPAIKAN PADA

**RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
HARI KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD
Para wakil dan para anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda dan Para Staf Ahli
Bupati

Ysh. Sekretaris DPRD beserta jajarannya

Ysh. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Ysh. Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen

Ysh. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen

Ysh. Hadirin dan Para Undangan Rapat Paripurna Dewan, para
wartawan dan segenap masyarakat Kebumen yang ikut
mencermati Rapat Paripurna Dewan, lewat siaran Radio In FM
atau Ratih Tv yang berbahagia.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sebelum mengawali penyampaian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis, 15 September 2022 kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat walafiat. Salam sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan semoga kita mendapat syafa'at di yaumil akhir. Aamiin YRA...

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan Hadirin yang berbahagia

Sebelum kami membacakan Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**, kami mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menggunakan mimbar terhormat ini, guna menyampaikan Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

- 2) Bupati dan jajaran eksekutif terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah melakukan pembahasan KUAPBD dan PPAS Tahun Anggaran 2023.
- 3) Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen, yang telah mencermati, membahas, serta mengkaji Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, hingga menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkait.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami Hormati,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** DPRD Kabupaten Kebumen memberikan Pandangan Umum sebagai berikut:

1. Melihat Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa masih memungkinkan dilakukan adanya penyesuaian. Pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.766.309.374.000,00 (*Dua triliun tujuh ratus enam puluh*

enam miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagian besar masih tergantung pada sumber pendanaan dari pemerintah pusat. Kemudian dalam Nota keuangan, tertulis bahwa berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah ditetapkan rencana 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu:

- 1) Peningkatan profesionalisme aparatur.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
- 4) Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah.
- 5) Peningkatan kondusivitas wilayah.

Berdasarkan pada rencana prioritas pembangunan tahun 2023 tersebut, pada poin 3 (tiga) dijelaskan adanya program peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta penjelasan terkait dengan langkah strategis dalam upaya penurunan kemiskinan, apakah pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi dari kenaikan BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dijadikan sebagai sebuah kolaborasi dalam program kegiatan pemerintah Kabupaten Kebumen

dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Sebab, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur menuju kesejahteraan masyarakat.

2. Mengenai estimasi pendapatan daerah pada rencana APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.766.309.374.000,00 (*Dua triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*). Apabila dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2022 bertambah sebesar Rp. 20.276.457.000,00 (*dua puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) atau naik 0,74%. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata realisasi selama lima tahun sebesar 14, 15% (*empat belas koma lima belas persen*). Hal ini masih menunjukkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD, sehingga **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa dalam hal ini APBD kita masih menunjukkan ketergantungan pada pemerintah pusat, dan perlu adanya upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan tersebut. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta penjelasan akan hal tersebut.

3. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Berdasarkan pada nota keuangan, tertulis bahwa Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.820.997.206.000,00 (*Dua triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah*). Kemudian Alokasi Belanja Daerah ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kebumen, yang mana telah dialokasikan pada program yang ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2023 yaitu :

- 1) Pengembangan ekonomi lokal;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- 4) Pembenahan infrastruktur pendukung ekonomi;
- 5) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan pada pengalokasian tersebut, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta penjelasan mengenai indikator kualitas belanja daerah di Kabupaten Kebumen guna mendorong kinerja prioritas pembangunan tersebut.

4. Mengenai masih tingginya belanja gaji pegawai dan belanja operasional dalam APBD 2023 yakni sebesar Rp 1.190.958.128.909,00 (*Satu triliun seratus sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus sembilan rupiah*) untuk belanja pegawai, yang mana dalam presentase belanja pegawai sudah melebihi 30 % (*tiga puluh persen*). **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** memandang bahwa apakah dengan tingginya belanja pegawai ini sudah dapat memberikan peningkatan kapasitas ataupun kinerja pegawai dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen. Kemudian mengenai tingginya belanja pegawai, apakah dengan tingginya belanja pegawai sudah dapat menutupi belanja-belanja lain seperti halnya pemenuhan belanja infrastruktur. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta penjelasan mengenai hal tersebut.

5. Selanjutnya mengenai pemenuhan alokasi belanja mandatory untuk infrastruktur yakni dalam nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2023 tertulis bahwa belanja mandatory untuk infrastruktur akan disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada. Lalu bagaimana dengan batas minimal untuk belanja infrastruktur yang harus dipenuhi oleh semua pemerintah daerah. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan kondisi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen dan apakah terdapat data atau informasi publik mengenai keberadaan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

6. Kemudian mengenai kebijakan umum belanja daerah, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** meminta penjelasan lebih konkrit mengenai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

7. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** juga berharap bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ini jangan hanya dijadikan sebagai proses dalam menaikkan ataupun menurunkan anggaran, tetapi dijadikan sebagai langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta stabilisasi daerah guna menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** juga meminta agar penyerapan anggaran nantinya bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga diharapkan bahwa penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian Pandangan Umum **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum banyak hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala kerendahan hati atas nama **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** kami memohon maaf yang setulus-tulusnya, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh.

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Ketua



Dodi Suprijanto

Sekretaris



Bagus Setiyawan